

ABSTRAK

Yanggi Suhawa (1208010224): “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Mendorong Digitalisasi Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kota Bandung”

Penelitian ini merujuk pada Permendagri No. 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Didalamnya berfokus pada implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mendorong digitalisasi administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola interaksi atau kebijakan ideal yang diterapkan Disdukcapil Kota Bandung dalam mendorong partisipasi masyarakat mengadopsi aplikasi IKD. Penelitian ini juga menganalisis persepsi dan respons kelompok sasaran terhadap perubahan perilaku terkait implementasi aplikasi IKD. Juga mengevaluasi kapasitas dan kompetensi Disdukcapil Kota Bandung sebagai organisasi pelaksana dalam menjalankan implementasi aplikasi IKD, serta menganalisis kontribusi faktor lingkungan, seperti budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Teori implementasi Smith (1973) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah rangkaian proses yang memperhatikan perubahan sosial dan politik. Pemerintah merancang kebijakan untuk memperbaiki atau mengubah masyarakat sebagai kelompok sasaran. Model Smith menekankan empat variabel utama dalam implementasi kebijakan: (1) Kebijakan yang Diidealkan, (2) Kelompok Sasaran, (3) Organisasi Pelaksana, dan (4) Faktor Lingkungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di Disdukcapil Kota Bandung serta observasi langsung terhadap proses implementasi aplikasi IKD. Analisis data dilakukan dengan cara triangulasi dan mengidentifikasi serta mengkategorikan temuan-temuan utama berdasarkan keempat variabel teori Smith.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Bandung diterapkan secara bertahap, dari internal hingga masyarakat luas. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, namun perlu ditingkatkan. Respon positif muncul saat manfaat aplikasi terasa langsung oleh masyarakat. Kerjasama lintas-sektor, pelatihan SDM, pengelolaan, dan evaluasi rutin ditekankan. Kesiapan infrastruktur teknis sudah ada, namun perlu evaluasi berkelanjutan. Kesenjangan digital diatasi dengan layanan konvensional dan digital, serta potensi penghematan anggaran dan efisiensi layanan terlihat. Dukungan politik konsisten diperlukan untuk keberlanjutan kebijakan ini.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Yanggi Suhawa (1208010224): “Implementation of the Identitas Kependudukan Digital (IKD) Application in Encouraging the Digitalization of Population Administration in Disdukcapil Bandung City”

This research refers to Permendagri No. 72 of 2022 concerning Standards and Specifications for Hardware, Software, and Electronic Identity Card Stamps and the Implementation of Digital Population Identity. It focuses on the implementation of the Digital Population Identity (IKD) application in encouraging the digitization of population administration in the Bandung City Disdukcapil.

The purpose of this study is to identify the ideal interaction pattern or policy implemented by Disdukcapil Bandung City in encouraging community participation in adopting the IKD application. This study also analyzes the perceptions and responses of target groups to behavioral changes related to the implementation of the IKD application. It also evaluates the capacity and competence of the Bandung City Disdukcapil as the implementing organization in carrying out the implementation of the IKD application, as well as analyzing the contribution of environmental factors, such as cultural, social, economic and political.

Smith's (1973) implementation theory suggests that policy implementation is a series of processes that pay attention to social and political change. The government designs policies to improve or change society as a target group. Smith's model emphasizes four main variables in policy implementation: (1) Idealized Policy, (2) Target Group, (3) Implementing Organization, and (4) Environmental Factors.

The research method used was a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with stakeholders in the Bandung City Disdukcapil and direct observation of the IKD application implementation process. Data analysis was conducted by triangulating and identifying and categorizing key findings based on Smith's four theoretical variables.

This research shows that the Digital Population Identity (IKD) application policy at Disdukcapil Bandung City is implemented in stages, from internal to the wider community. Socialization is carried out through various methods, but needs to be improved. Positive responses emerged when the benefits of the application were felt directly by the community. Cross-sector cooperation, human resource training, management and regular evaluation are emphasized. Technical infrastructure readiness is in place, but needs continuous evaluation. The digital divide is being addressed with conventional and digital services, and potential budget savings and service efficiencies are evident. Consistent political support is needed for the sustainability of this policy.

Keywords: *Population Administration, Digital Population Identity, Policy Implementation*